



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Sidang BBM Seluma Hadirkan 30 Saksi

BENGKULU, BE - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma, menyiapkan 30 orang saksi sidang kasus korupsi pemeliharaan kendaraan dinas dan anggaran bahan bakar minyak (BBM) di Sekretariat DPRD (Setwan) Seluma, 2017. Puluhan saksi tersebut dipanggil bergantian pada sidang selanjutnya. Pada sidang Kamis pekan depan, jaksa berencana memanggil saksi dari Sekretariat DPRD Seluma.

"Saksi yang kita siapkan sekitar 30 orang, untuk sidang pekan depan kita berencana menghadirkan dari Sekretariat DPRD Seluma," jelas Jaksa Kejati Bengkulu, Dewi Kemalasari SH.

Sejumlah saksi yang nanti dihadirkan didalam persidangan, diantaranya pihak ketiga atau pemilik bengkel yang memelihara mobil di-

nas dewan dan mantan dan anggota DPRD Seluma yang mengetahui dan terlibat dengan kasus korupsi tersebut.

"Banyak pastinya dari pihak bengkel sampai mantan anggota dewan kita hadirkan," imbuhnya.

Dua orang terdakwa Fery Lastoni selaku PPTK dan Syamsul Asri selaku bendahara didakwa pasal 2 dan pasal 3 juncto pasal 18 ayat (10) huruf b ayat (2), ayat (3) undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana.

Total kerugian negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi tersebut Rp 900 juta

dari anggaran Rp 436 juta untuk suku cadang dan belanja BBM sebesar Rp1,2 miliar. Seperti diketahui sebelumnya, anggaran biaya perbaikan suku cadang Rp 436 juta dan belanja BBM sebesar Rp 1,2 miliar untuk 12 unit mobil dinas lingkungan Sekretariat DPRD Seluma, 2017. Ada dugaan temuan fiktif dalam penggunaan anggaran tersebut. Mark Up belanja BBM Pimpinan dan Anggota DPRD Seluma dan alat perlengkapan DPRD Seluma. Saat dilakukan pemeriksaan audit BPK tidak ada kerugian negara. Hanya saja masih ada kekurangan administrasi jenis struk pembelian BBM, kemudian administrasi dilengkapi oleh sekretariat dewan, namun diduga terjadi penyimpangan dalam kelengkapan administrasi itu sehingga dilakukan penyidikan oleh Polda Bengkulu. (167)